

Ringkasan Kebijakan

Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024

Pesan Utama

- Presiden RI pada 4 Maret 2020 menyampaikan arahan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem (US\$1,9 PPP) hingga nol persen tercapai pada 2024, lebih cepat enam tahun dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- Agar program pengurangan kemiskinan ekstrem (implementasi tahap I) benar-benar dapat dieksekusi sebelum akhir 2021, dalam jangka pendek pemerintah berfokus menjalankan program di tujuh provinsi (35 kabupaten/kota) prioritas yang mencakup 20 persen populasi miskin ekstrem dengan persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi.
- Dalam implementasi tahap I, pemerintah merancang program jangka pendek dengan pemberian bantuan langsung tunai tambahan selama tiga bulan (mulai Oktober hingga Desember 2021) berupa *top up* untuk program Kartu Sembako dan *top up* Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Untuk implementasi tahap II, pemerintah menentukan lokasi prioritas di 212 kabupaten/kota yang mencakup 75 persen populasi miskin ekstrem dengan persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi.

Latar Belakang

Pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas pemerintah. Sebagaimana arahan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Agar program lebih terarah dan target dapat dicapai, definisi kemiskinan ekstrem perlu disepakati.

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) di bawah US\$1,9 per hari.¹

Penduduk miskin diukur dari konsumsi makanan dan nonmakanan yang didasarkan pada ukuran moneter yang disebut dengan garis kemiskinan (GK).

¹ Atkinson, A. 2016. A Cover Note to the Report of the Commission on Global Poverty: Recommendation 1 calls for the extreme poverty line to be cited as "the International Poverty Line (IPL)", and expressed in each country in terms of its local currency.

GK nasional sebesar Rp472.525 per kapita per bulan yang setara dengan US\$2,51 PPP per orang per hari. Adapun jumlah penduduk miskin sebanyak 27,54 juta jiwa atau 10,14 persen dari populasi (Susenas Maret 2021, BPS).

Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific* (2019) disebutkan bahwa pada 2017, nilai US\$1,9 PPP setara dengan Rp11.941 per kapita per hari, yang untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode tahun yang bersesuaian. Tingkat kemiskinan ekstrem

Indonesia pada 2021 sebesar 4 persen dengan jumlah orang miskin ekstrem sebanyak 10,86 juta jiwa (Tabel 1). Sehingga dengan terminologi tersebut, pengentasan kemiskinan ekstrem akan lebih dapat dijalankan dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diharapkan dalam jangka pendek, dengan memfokuskan program yang menysasar keluarga miskin ekstrem yang jumlahnya jauh di bawah garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (US\$2,51 PPP per orang per hari), kemiskinan ekstrem akan lebih mudah untuk dientaskan.

Tabel 1. Perbandingan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Angka Kemiskinan BPS

Tahun	Kemiskinan esktrim			Kemiskinan BPS			Konversi GK Nasional ke US\$ PPP
	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan Konversi dari US\$1,9 PPP)	% Penduduk Miskin (Po)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	% Penduduk Miskin (Po)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	
2012	238.288,5	11,7	28,50	267.408	11,96	29,13	2.13
2013	249.910,8	9,4	23,23	289.041	11,36	29,07	2.20
2014	261.647,7	7,9	19,86	318.514	11,25	28,28	2.31
2015	284.184,9	7,2	18,35	342.541	11,22	28,59	2.34
2016	285.184,9	6,5	16,76	364.527	10,86	28,01	2.44
2017	305.720,2	5,7	14,88	374.478	10,64	27,77	2.33
2018	316.736,1	4,7	12,42	401.220	9,82	25,95	2,41
2019	323.291,0	3,7	9,89	425.250	9,41	25,14	2,49
2020	345.291,6	3,9	10,54	454.652	9,78	26,42	2.50
2021	358.232,6	4,0	10,86	472.525	10,14	27,54	2.51

Sumber: BPS dan Bank Dunia, berbagai tahun diolah

Agar target angka kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2024 tercapai, diperlukan program yang luar biasa. Program itu pun harus dipastikan dapat dieksekusi sebelum akhir 2021. Maka pada rapat terbatas pada 21 Juli 2021, pemerintah memutuskan bahwa dalam jangka pendek akan memfokuskan program di wilayah dengan masalah kemiskinan ekstrem yang tinggi—daerah yang memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan segera mengimplementasikan program tahap I dan merancang model konvergensi penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagai tahap awal.

Untuk implementasi program tahap I yang dilaksanakan hingga akhir 2021, pemerintah menetapkan tujuh provinsi prioritas, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur,

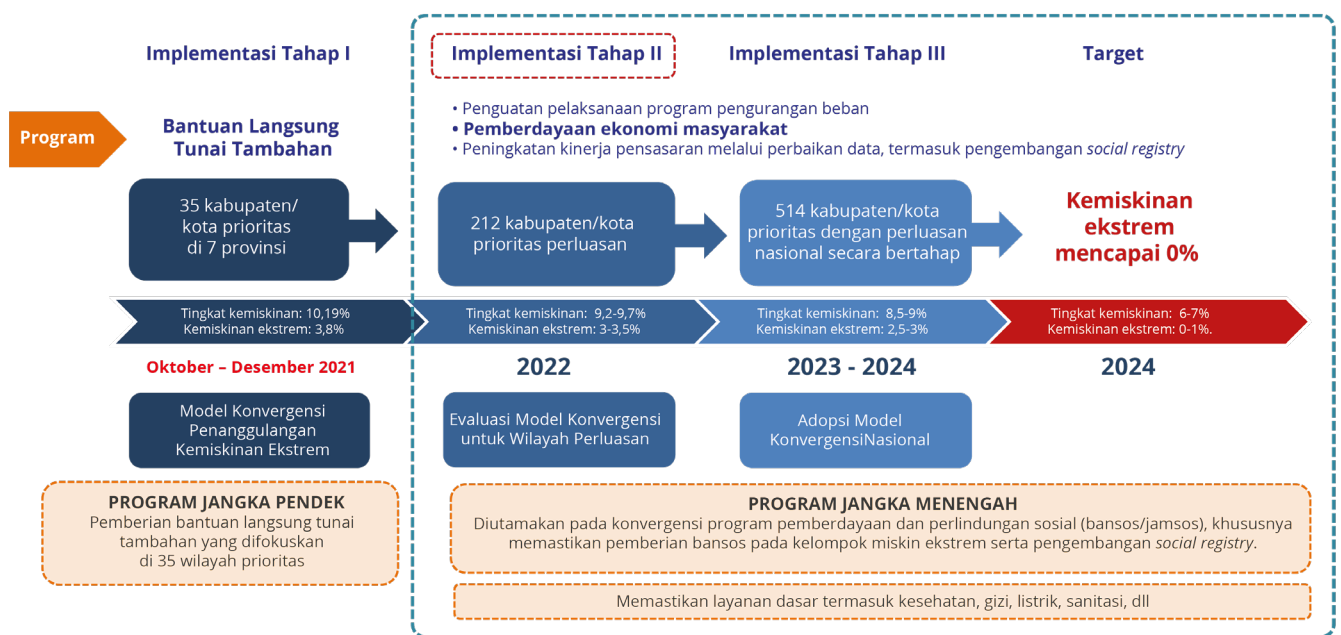
Maluku, Papua, dan Papua Barat.² Selanjutnya, dari provinsi prioritas tersebut dipilih lima kabupaten/kota, sehingga total wilayah prioritas tahap I berjumlah 35 kabupaten/kota. Penentuan 35 kabupaten/kota tersebut berdasarkan indeks kemiskinan ekstrem yang dirancang untuk mewakili sekitar 20 persen penduduk miskin ekstrem atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta penduduk miskin ekstrem secara nasional.

Untuk perluasan program pada 2022 atau implementasi tahap II, pemerintah merancang skenario penentuan wilayah prioritas dalam rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengenai koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 25 Agustus 2021. Dalam skenario tersebut, cakupan dari penduduk miskin ekstrem di wilayah prioritas diputuskan mewakili sekitar 75 persen penduduk miskin ekstrem secara nasional. Adapun

untuk implementasi tahap III pada 2023-2004, model konvergensi dilakukan secara nasional dan menyeluruh di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam dokumen tiga pilar percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem disebutkan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kantor Staf Presiden dan TNP2K mendapat tugas dari pemerintah untuk menetapkan regulasi tentang prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dan penentuan lokasi wilayah prioritas. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024 tertanggal 16 Juni 2022, terdapat 212 lokasi prioritas sesuai dengan metode pengukuran yang dirancang ini.

Gambar 1. Rencana Kerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)



Sumber: TNP2K dan Kemenko Perekonomian, 2021

² Rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI mengenai strategi penanggulangan kemiskinan kronis, 21 Juli 2021.

Metode Pemilihan Wilayah Prioritas

Pemilihan wilayah prioritas penurunan angka kemiskinan ekstrem dilakukan dengan pendekatan penetapan prioritas intervensi berbasis wilayah atau lebih dikenal dengan penargetan geografis (*geographical targeting*). Wilayah prioritas disusun dan ditetapkan dengan menggunakan dua indikator utama, yaitu persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten/kota, dengan bobot masing-masing 50:50 dan mempertimbangkan:

- Jika hanya menggunakan persentase penduduk miskin, konsentrasi wilayah akan berada di Indonesia bagian timur.
- Jika hanya menggunakan jumlah penduduk miskin, konsentrasi wilayah berada di Jawa.
- Kombinasi persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem merupakan alternatif yang lebih optimal untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Indeks yang terbentuk disebut indeks kemiskinan ekstrem.

Setelah indeks disusun, selanjutnya dipilih lima kabupaten/kota dengan nilai indeks kemiskinan ekstrem tertinggi di setiap provinsi. Informasi kemiskinan ekstrem diperoleh dari Susenas Maret 2020 (BPS).

$$X1_i = \frac{x_{1i}}{\sum_{i=1}^n(x_{1i})} \quad (1)$$

$$X2_i = \frac{x_{2i}}{\sum_{i=1}^n(x_{2i})} \quad (2)$$

$$K0_i = 0,5 * X1_i + 0,5 * X2_i \quad (3)$$

Keterangan:

$K0$ = Koefisien Kemiskinan Ekstrem

$X1$ = Indeks Tingkat Kemiskinan Ekstrem

$X2$ = Indeks Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem

$x1$ = Tingkat Kemiskinan Ekstrem

$x2$ = Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem

i = Kabupaten/Kota

selain mempertimbangkan angka indeks kemiskinan ekstrem yang tertinggi, penentuan lima kabupaten/kota di setiap provinsi prioritas pada 2021 dirancang untuk mendapatkan sekitar 20 persen penduduk miskin ekstrem secara nasional supaya segera dilakukan intervensi pada tahap I. Pada 2022, intervensi diperluas ke wilayah prioritas yang mewakili setidaknya 75 persen penduduk miskin ekstrem secara nasional.

Hasil Pemilihan Wilayah Prioritas

A. Hasil Pemilihan Wilayah Implementasi Tahap I pada 2021

Pemilihan wilayah prioritas untuk tahap I yang dilaksanakan pada 2021 menghasilkan 35 kabupaten/

kota di tujuh provinsi prioritas. Di wilayah tersebut, tercakup penduduk miskin ekstrem yang mewakili sekitar 20 persen penduduk miskin ekstrem atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta penduduk miskin ekstrem secara nasional. Adapun sebaran 35 kabupaten/kota wilayah prioritas pada 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Sebaran 35 Kabupaten/Kota Wilayah Prioritas Tahun 2021



Sumber: Hasil analisis

Karakteristik penduduk miskin ekstrem di 35 kabupaten/kota wilayah prioritas dan wilayah nonprioritas pada 2021 ditunjukkan pada Tabel 2. Setelah pemilihan 35 kabupaten/kota prioritas diketahui bahwa cakupan penduduk miskin ekstrem di wilayah tersebut sedikit lebih besar dari target 20 persen, yakni 20,16 persen atau sekitar 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta penduduk miskin ekstrem secara nasional. Di luar 35 kabupaten/kota tersebut, ada sekitar 8,3 juta jiwa jumlah penduduk miskin ekstrem yang perlu diatasi.

Di 35 kabupaten/kota terpilih tersebut, pengeluaran per kapita rata-rata per bulan keluarga miskin ekstrem berkisar Rp1,12 juta, lebih kecil jika dibandingkan dengan di wilayah nonprioritas, yakni Rp1,39 juta, seperti terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di 35 wilayah prioritas rata-rata mencapai 6,23 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah nonprioritas, yakni sebesar 3,53 persen (Tabel 2).

Tabel 2. Kontribusi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di 35 Wilayah Prioritas Tahun 2021

Karakteristik	212 Wilayah Prioritas	Non-Prioritas	Total
Pengeluaran per Kapita (Rp/Bulan)	1.120.635	1.389.849	1.225.685
Kemiskinan Ekstrem (US\$1,9 PPP)			
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	2.096.771	8.304.569	10.401.340
Kontribusi terhadap Total Penduduk Miskin Ekstrem (%)	20,16	79,84	100
Tingkat Kemiskinan (%)	6,23	3,53	3,85
Kemiskinan Nasional (GK Nasional)			
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	3.952.726	22.470.400	26.423.126
Kontribusi terhadap Total Penduduk Miskin (%)	14,96	85,04	100
Tingkat Kemiskinan (%)	11,75	9,56	9,78

Sumber: Susenas (2020), diolah

B. Hasil Pemilihan Wilayah Implementasi Tahap II pada 2022

Untuk implementasi tahap II yang dilaksanakan pada 2022, pemilihan wilayah prioritas menggunakan indeks kemiskinan ekstrem dan memperhatikan cakupan penduduk miskin ekstrem yang akan disasar di wilayah tersebut. Target cakupan penduduk miskin yang disasar setidaknya mewakili sekitar 75 persen penduduk miskin

Berdasarkan rumusan indeks kemiskinan ekstrem, terpilih wilayah prioritas implementasi tahap II sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Dari jumlah itu, sebanyak 35 kabupaten/kota adalah wilayah prioritas pada tahun sebelumnya. Sisanya adalah wilayah baru, yakni 177 kabupaten/kota di 18 provinsi. Adapun sebaran 212 kabupaten/kota wilayah prioritas pada 2022 ditunjukkan pada Gambar 3.

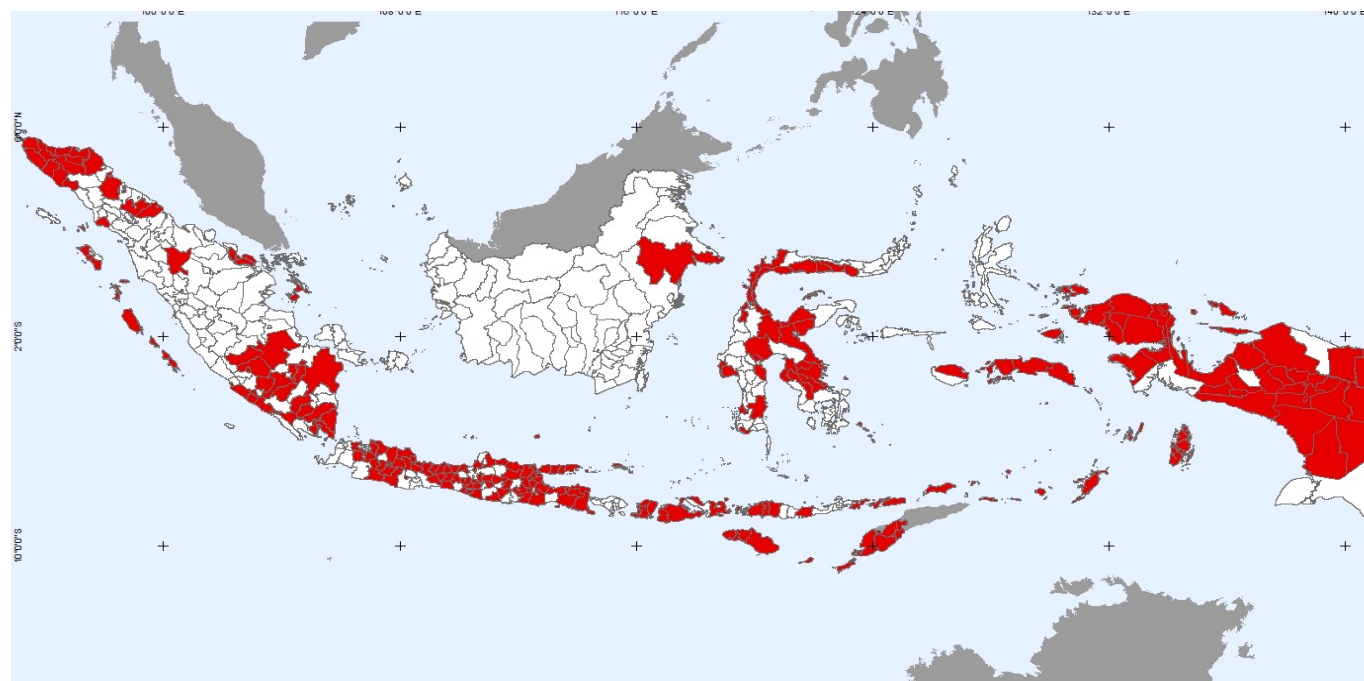
Secara umum, jumlah penduduk miskin ekstrem di 212 wilayah prioritas sudah mencapai ketercukupan yang ditargetkan oleh pemerintah, yakni 75 persen dari jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.³ Ketercukupannya mencapai 75,1 persen atau 7,8 juta jiwa dari total 10,4 juta penduduk miskin ekstrem secara nasional.

Artinya, masih terdapat 2,6 juta penduduk miskin ekstrem yang berada di luar wilayah 212 kabupaten/kota wilayah prioritas yang perlu diantisipasi (Tabel 3).

Karakteristik penduduk miskin ekstrem di wilayah prioritas dan wilayah nonprioritas pada 2022 ditunjukkan pada Tabel 4. Pengeluaran per kapita rata-rata per bulan keluarga miskin ekstrem di 212 kabupaten/kota berkisar Rp1,15 juta, lebih besar jika dibandingkan dengan di wilayah nonprioritas, yakni Rp1,28 juta (Tabel 3).

3 Rapat pleno TNP2K mengenai koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 25 Agustus 2021.

Gambar 3. Sebaran 212 Kabupaten/Kota Wilayah Prioritas Tahun 2022



Legenda

- Wilayah prioritas tahun 2022
- Bukan wilayah prioritas tahun 2022



Sumber: Hasil analisis

Tabel 3. Kontribusi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di 212 Wilayah Prioritas Tahun 2022

Karakteristik	35 Wilayah Prioritas	Non-Prioritas	Total
Pengeluaran per Kapita (Rp/Bulan)	1.150.327	1.286.209	1.225.686
Kemiskinan Ekstrem (US\$1,9 PPP)			
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	7.811.400	2.589.962	10.401.362
Kontribusi terhadap Total Penduduk Miskin Ekstrem (%)	75,10	24,90	100
Tingkat Kemiskinan (%)	4,59	3,25	3,85
Kemiskinan Nasional (GK Nasional)			
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	17.565.250	8.858.268	26.424.018
Kontribusi terhadap Total Penduduk Miskin (%)	64,47	33,35	100
Tingkat Kemiskinan (%)	9,94	9,64	9,78

Sumber: Susenas (2020), diolah

Rekomendasi

Penentuan wilayah prioritas bertujuan untuk memfokuskan alokasi sumber daya yang terbatas sekaligus untuk memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan ke depan untuk menyempurnakan penentuan wilayah prioritas di antaranya:

1. Kemenko PMK telah menetapkan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2022-2024 tertanggal 16 Juni 2022. Terdapat 212 lokasi prioritas sesuai dengan metode pengukuran yang dirancang ini.
2. Penetapan wilayah prioritas membantu memfokuskan pelaksanaan program dari sisi lokasi maupun waktu pelaksanaannya. Jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem di suatu wilayah memudahkan memilih lokasi yang tepat untuk melaksanakan program penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.
3. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Dua kelompok program, yaitu (i) penurunan beban pengeluaran dan (ii) peningkatan pendapatan, harus dipastikan menjangkau kelompok miskin ekstrem.
4. Konvergensi program antar-kementerian/lembaga dan program daerah di 35 kabupaten/kota prioritas 2021 perlu diperkuat dengan strategi koordinasi yang baik, sehingga realisasi bantuan mencapai target yang telah dicanangkan. Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi dalam:
 - a. Penguatan peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) sebagai pusat koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2020,
 - b. Melakukan konvergensi program/kegiatan,
 - c. Menyiapkan konvergensi data sasaran penerima program/kegiatan, dan
 - d. Penguatan kolaborasi kerja dengan sektor nonpemerintah.

Referensi

- Atkinson, A. 2016. "A Cover Note to the Report of the Commission on Global Poverty", *Monitoring Global Poverty*. World Bank.
- Risalah rapat terbatas Presiden RI mengenai strategi penanggulangan kemiskinan kronis, 21 Juli 2021
- Risalah rapat pleno TNP2K mengenai koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, 25 Agustus 2021.

LAMPIRAN

No	prov	idkab	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem*	Terpilih
1	11	1102	Aceh Singkil	25,43	20,20	9,12	1
2	11	1105	Aceh Timur	62,34	14,08	5,56	0
3	11	1106	Aceh Tengah	32,48	15,08	6,19	0
4	11	1107	Aceh Barat	39,06	18,34	7,44	1
5	11	1108	Aceh Besar	59,70	13,84	6,99	0
6	11	1109	Pidie	86,39	19,23	4,79	0
7	11	1110	Bireuen	62,42	13,06	5,53	0
8	11	1111	Aceh Utara	106,41	17,02	7,45	1
9	11	1112	Aceh Barat Daya	24,21	15,93	10,47	1
10	11	1115	Nagan Raya	29,99	17,70	7,94	1
11	11	1116	Aceh Jaya	12,11	12,87	6,99	0
12	11	1117	Bener Meriah	28,38	18,89	10,10	1
13	11	1118	Pidie Jaya	31,39	19,19	7,37	1
14	12	1208	Asahan	66,32	9,04	3,81	0
15	12	1209	Simalungun	73,64	8,46	4,86	0
16	12	1213	Langkat	101,87	9,73	4,00	0
17	12	1214	Nias Selatan	53,88	16,74	6,72	0
18	12	1224	Nias Utara	34,75	25,07	10,59	1
19	12	1225	Nias Barat	22,33	25,69	7,54	1
20	12	1275	Kota Medan	183,54	8,01	2,61	0
21	13	1301	Kepulauan Mentawai	13,37	14,35	7,78	1
22	14	1407	Rokan Hulu	73,35	10,31	4,86	0
23	14	1410	Kepulauan Meranti	47,10	25,28	11,22	1
24	16	1601	Ogan Komering Ulu	47,30	12,75	5,14	0
25	16	1602	Ogan Komering Ilir	123,34	14,73	8,44	1
26	16	1603	Muara Enim	79,27	12,32	4,44	0
27	16	1604	Lahat	65,75	15,95	8,02	1
28	16	1605	Musi Rawas	54,95	13,50	7,21	0
29	16	1606	Musi Banyuasin	105,38	16,13	10,87	1
30	16	1610	Ogan Ilir	57,97	13,36	6,01	0
31	16	1613	Musi Rawas Utara	37,75	19,47	9,03	1
32	16	1671	Kota Palembang	182,61	10,89	3,96	0
33	16	1674	Kota Lubuklinggau	29,80	12,71	6,67	0
34	17	1701	Bengkulu Selatan	28,41	17,82	9,99	1
35	17	1704	Kaur	22,57	18,47	6,77	0
36	17	1705	Seluma	36,23	18,56	7,75	1
37	17	1771	Kota Bengkulu	69,12	17,65	9,86	1
38	18	1801	Lampung Barat	38,12	12,52	5,38	0
39	18	1803	Lampung Selatan	143,33	14,08	7,82	1
40	18	1804	Lampung Timur	153,57	14,62	5,77	0
41	18	1805	Lampung Tengah	152,28	11,82	4,73	0
42	18	1806	Lampung Utara	119,35	19,30	7,88	1

43	18	1807	Way Kanan	58,41	12,90	4,60	0
44	18	1809	Pesawaran	66,04	14,76	5,72	0
45	18	1871	Kota Bandar Lampung	93,74	8,81	4,49	0
46	21	2104	Lingga	12,45	13,85	6,92	0
47	31	3175	Kota Jakarta Utara	123,59	6,78	2,95	0
48	32	3201	Bogor	465,67	7,69	1,17	0
49	32	3203	Cianjur	234,47	10,36	3,83	0
50	32	3204	Bandung	263,60	6,91	2,46	0
51	32	3205	Garut	262,78	9,98	1,97	0
52	32	3208	Kuningan	139,20	12,82	6,30	0
53	32	3209	Cirebon	247,94	11,24	3,30	0
54	32	3210	Majalengka	138,21	11,43	3,00	0
55	32	3211	Sumedang	118,38	10,26	4,99	0
56	32	3212	Indramayu	220,31	12,70	6,02	0
57	32	3213	Subang	149,81	9,31	3,75	0
58	32	3215	Karawang	195,41	8,26	4,51	0
59	32	3216	Bekasi	186,30	4,82	2,29	0
60	32	3217	Bandung Barat	179,46	10,49	2,91	0
61	32	3273	Kota Bandung	100,02	3,99	1,71	0
62	32	3274	Kota Cirebon	30,61	9,52	5,32	0
63	32	3276	Kota Depok	60,43	2,45	2,45	0
64	32	3278	Kota Tasikmalaya	86,13	12,97	4,24	0
65	33	3302	Banyumas	225,84	13,26	6,83	0
66	33	3303	Purbalingga	149,48	15,90	6,66	0
67	33	3304	Banjarnegara	144,95	15,64	7,09	0
68	33	3305	Kebumen	211,09	17,59	7,68	1
69	33	3307	Wonosobo	137,64	17,36	5,67	0
70	33	3308	Magelang	146,34	11,27	2,76	0
71	33	3309	Boyolali	100,59	10,18	3,30	0
72	33	3310	Klaten	151,83	12,89	4,17	0
73	33	3313	Karanganyar	91,72	10,28	4,50	0
74	33	3314	Sragen	119,38	13,38	5,48	0
75	33	3317	Rembang	100,08	15,60	8,27	1
76	33	3318	Pati	127,37	10,08	3,57	0
77	33	3321	Demak	146,87	12,54	4,57	0
78	33	3324	Kendal	97,49	9,99	4,28	0
79	33	3325	Batang	70,57	9,13	3,99	0
80	33	3326	Pekalongan	91,86	10,19	4,23	0
81	33	3327	Pemalang	209,03	16,02	9,52	1
82	33	3328	Tegal	117,50	8,14	3,00	0
83	33	3329	Brebes	308,78	17,03	10,11	1
84	34	3401	Kulon Progo	78,06	18,01	8,68	1
85	34	3402	Bantul	138,66	13,50	4,75	0
86	34	3403	Gunung Kidul	127,61	17,07	6,13	0
87	34	3404	Sleman	99,78	8,12	4,67	0
88	35	3501	Pacitan	80,82	14,54	6,35	0
89	35	3502	Ponorogo	86,74	9,95	3,74	0
90	35	3505	Blitar	108,55	9,33	3,64	0

91	35	3506	Kediri	179,93	11,40	3,67	0
92	35	3507	Malang	265,56	10,15	3,27	0
93	35	3509	Jember	247,99	10,09	3,23	0
94	35	3510	Banyuwangi	130,37	8,06	3,63	0
95	35	3511	Bondowoso	110,24	14,17	5,59	0
96	35	3512	Situbondo	83,74	12,22	4,67	0
97	35	3513	Probolinggo	218,35	18,61	9,33	1
98	35	3514	Pasuruan	151,43	9,26	2,55	0
99	35	3515	Sidoarjo	127,05	5,59	2,32	0
100	35	3516	Mojoekerto	118,80	10,57	5,78	0
101	35	3517	Jombang	125,94	9,94	5,11	0
102	35	3519	Madiun	78,30	11,46	4,03	0
103	35	3521	Ngawi	128,19	15,44	6,05	0
104	35	3522	Bojonegoro	161,10	12,87	4,76	0
105	35	3523	Tuban	187,13	15,91	6,14	0
106	35	3524	Lamongan	164,68	13,85	7,37	1
107	35	3525	Gresik	164,05	12,40	6,90	0
108	35	3526	Bangkalan	204,00	20,56	12,25	1
109	35	3527	Sampang	224,74	22,78	7,31	1
110	35	3528	Pamekasan	129,41	14,60	6,12	0
111	35	3529	Sumenep	220,23	20,18	11,94	1
112	35	3578	Kota Surabaya	145,67	5,02	2,39	0
113	36	3603	Tangerang	242,16	6,23	2,75	0
114	36	3674	Kota Tangerang Selatan	40,99	2,29	2,29	0
115	52	5201	Lombok Barat	100,25	14,28	8,50	1
116	52	5202	Lombok Tengah	128,10	13,44	3,27	0
117	52	5203	Lombok Timur	183,84	15,24	4,32	0
118	52	5204	Sumbawa	62,88	13,65	5,91	0
119	52	5206	Bima	71,32	14,49	6,14	0
120	52	5207	Sumbawa Barat	20,20	13,34	6,24	0
121	52	5208	Lombok Utara	59,86	26,99	16,53	1
122	52	5271	Kota Mataram	41,80	8,47	4,82	0
123	53	5301	Sumba Barat	36,95	28,17	16,68	1
124	53	5302	Sumba Timur	77,30	29,65	17,47	1
125	53	5303	Kupang	94,94	22,77	10,89	1
126	53	5304	Timor Tengah Selatan	128,98	27,49	17,14	1
127	53	5305	Timor Tengah Utara	56,98	22,28	10,73	1
128	53	5306	Belu	34,18	15,37	8,52	1
129	53	5307	Alor	43,55	21,09	6,79	0
130	53	5308	Lembata	37,92	26,14	14,50	1
131	53	5311	Ende	65,22	23,76	13,53	1
132	53	5313	Manggarai	69,52	20,34	12,50	1
133	53	5314	Rote Ndao	48,77	27,54	16,14	1
134	53	5315	Manggarai Barat	49,40	17,71	8,23	1
135	53	5316	Sumba Tengah	25,37	34,49	20,47	1
136	53	5317	Sumba Barat Daya	97,81	28,00	12,00	1
137	53	5319	Manggarai Timur	76,69	26,52	14,88	1
138	53	5320	Sabu Raijua	30,14	30,18	16,44	1

139	53	5321	Malaka	31,12	16,04	7,33	1
140	53	5371	Kota Kupang	39,72	8,96	5,35	0
141	64	6404	Kutai Timur	36,98	9,55	5,38	0
142	72	7203	Morowali	16,50	13,43	6,45	0
143	72	7204	Poso	40,20	15,45	6,65	0
144	72	7205	Donggala	53,17	17,39	9,20	1
145	72	7206	Toli-Toli	30,51	12,85	7,18	0
146	72	7208	Parigi Moutong	78,76	15,85	8,32	1
147	72	7209	Tojo Una-Una	25,43	16,39	8,86	1
148	72	7212	Morowali Utara	18,38	14,10	6,90	0
149	73	7304	Jeneponto	53,24	14,58	7,15	0
150	73	7309	Pangkajene Dan Kepulauan	47,12	13,96	6,80	0
151	73	7311	Bone	81,33	10,68	4,99	0
152	73	7317	Luwu	46,04	12,65	5,52	0
153	73	7322	Luwu Utara	42,20	13,41	6,42	0
154	74	7403	Konawe	31,63	12,20	5,85	0
155	74	7407	Wakatobi	13,75	14,31	8,76	1
156	74	7408	Kolaka Utara	19,83	12,96	6,53	0
157	74	7410	Konawe Utara	8,78	13,53	7,98	1
158	74	7411	Kolaka Timur	26,38	13,47	6,74	0
159	75	7501	Boalemo	31,63	18,57	6,30	0
160	75	7502	Gorontalo	66,73	17,56	12,27	1
161	75	7503	Pohuwato	28,92	17,62	7,89	1
162	75	7504	Bone Bolango	25,72	15,81	10,46	1
163	76	7601	Majene	24,12	13,73	6,35	0
164	76	7602	Polewali Mandar	68,18	15,26	7,04	0
165	81	8101	Maluku Tenggara Barat	30,74	27,11	18,46	1
166	81	8102	Maluku Tenggara	22,59	22,57	12,82	1
167	81	8103	Maluku Tengah	74,18	19,83	10,53	1
168	81	8104	Buru	24,42	16,64	6,41	0
169	81	8105	Kepulauan Aru	25,45	26,26	11,16	1
170	81	8106	Seram Bagian Barat	43,15	25,11	10,80	1
171	81	8107	Seram Bagian Timur	26,69	23,04	12,13	1
172	81	8108	Maluku Barat Daya	21,37	29,15	14,36	1
173	81	8172	Kota Tual	17,36	22,51	11,92	1
174	91	9101	Fakfak	17,72	22,27	17,23	1
175	91	9103	Teluk Wondama	10,22	30,91	24,08	1
176	91	9104	Teluk Bintuni	19,22	29,39	20,79	1
177	91	9105	Manokwari	35,92	20,14	15,05	1
178	91	9106	Sorong Selatan	8,71	18,28	8,85	1
179	91	9107	Sorong	24,89	27,48	16,42	1
180	91	9108	Raja Ampat	8,32	17,01	7,26	0
181	91	9109	Tambrauw	4,59	32,80	22,44	1
182	91	9110	Maybrat	12,80	30,78	22,89	1
183	91	9111	Manokwari Selatan	7,09	28,88	20,97	1
184	91	9112	Pegunungan Arfak	10,68	33,81	13,72	1
185	91	9171	Kota Sorong	38,91	14,99	7,35	1
186	94	9402	Jayawijaya	81,71	37,22	30,84	1

187	94	9403	Jayapura	16,61	12,44	6,23	0
188	94	9404	Nabire	36,75	24,15	18,65	1
189	94	9408	Kepulauan Yapen	27,04	26,30	17,19	1
190	94	9409	Biak Numfor	38,02	24,57	15,56	1
191	94	9410	Paniai	65,98	36,71	17,72	1
192	94	9411	Puncak Jaya	46,07	34,74	26,53	1
193	94	9412	Mimika	31,75	14,26	9,50	1
194	94	9413	Boven Digoel	13,86	19,41	9,28	1
195	94	9414	Mappi	26,91	25,04	14,96	1
196	94	9415	Asmat	25,12	25,49	9,59	1
197	94	9416	Yahukimo	71,76	37,34	20,29	1
198	94	9417	Pegunungan Bintang	23,03	30,15	14,73	1
199	94	9418	Tolikara	44,88	32,04	19,61	1
200	94	9420	Keerom	9,42	16,32	6,99	0
201	94	9426	Waropen	9,44	29,54	25,27	1
202	94	9427	Supiori	7,78	36,91	28,65	1
203	94	9428	Mamberamo Raya	6,98	28,38	13,22	1
204	94	9429	Nduga	36,54	36,72	20,46	1
205	94	9430	Lanny Jaya	68,62	38,13	30,52	1
206	94	9431	Mamberamo Tengah	17,72	36,41	29,19	1
207	94	9432	Yalimo	20,84	32,82	27,59	1
208	94	9433	Puncak	42,43	36,96	25,82	1
209	94	9434	Dogiyai	28,31	28,62	11,70	1
210	94	9435	Intan Jaya	20,46	40,71	18,69	1
211	94	9436	Deiyai	30,98	41,76	32,48	1
212	94	9471	Kota Jayapura	33,80	11,16	5,88	0
213	35	3518	Nganjuk	122,73	11,62	3,07	0
214	53	5310	Sikka	42,18	13,12	5,12	0
215	74	7409	Buton Utara	9,13	14,10	6,66	0
216	53	5312	Ngada	20,62	12,51	5,93	0
217	11	1103	Aceh Selatan	30,91	12,87	5,47	0
218	15	1571	Kota Jambi	50,44	8,27	4,01	0
219	17	1708	Kepahiang	20,27	14,69	6,08	0
220	74	7402	Muna	28,73	12,83	5,55	0
221	75	7505	Gorontalo Utara	19,56	16,88	6,17	0
222	73	7318	Tana Toraja	28,41	12,10	5,44	0
223	72	7210	Sigi	30,00	12,45	5,38	0
224	74	7405	Konawe Selatan	34,22	10,74	4,89	0
225	15	1507	Tanjung Jabung Barat	34,79	10,29	4,78	0
226	32	3271	Kota Bogor	75,04	6,68	2,76	0
227	33	3372	Kota Surakarta	47,03	9,03	4,04	0
228	33	3322	Semarang	79,88	7,51	2,84	0
229	14	1401	Kuantan Singingi	29,34	8,91	4,72	0
230	12	1204	Tapanuli Tengah	47,19	12,38	4,49	0
231	74	7404	Kolaka	23,76	11,63	5,30	0
232	32	3214	Purwakarta	80,17	8,27	2,95	0
233	73	7326	Toraja Utara	27,88	12,01	5,06	0
234	14	1471	Kota Pekanbaru	30,40	2,62	2,62	0

235	35	3503	Trenggalek	81,06	11,62	3,41	0
236	73	7306	Gowa	57,68	7,38	3,22	0
237	61	6108	Kapuas Hulu	23,93	8,99	4,78	0
238	11	1104	Aceh Tenggara	28,98	13,21	4,98	0
239	31	3101	Kepulauan Seribu	3,63	14,87	6,18	0
240	91	9102	Kaimana	9,52	15,50	5,89	0
241	73	7301	Kepulauan Selayar	17,04	12,48	5,35	0
242	32	3218	Pangandaran	36,05	8,99	4,11	0
243	32	3275	Kota Bekasi	134,01	4,38	1,25	0
244	12	1223	Labuhan Batu Utara	34,86	9,53	4,18	0
245	72	7201	Banggai Kepulauan	16,70	14,04	5,33	0
246	53	5318	Nagekeo	18,51	12,61	5,15	0
247	61	6106	Ketapang	53,45	10,29	3,62	0
248	74	7413	Muna Barat	11,32	13,30	5,45	0
249	36	3602	Lebak	120,83	9,24	2,24	0
250	17	1703	Bengkulu Utara	36,67	11,67	4,29	0
251	71	7171	Kota Manado	25,55	5,86	3,85	0
252	36	3671	Kota Tangerang	118,22	5,22	1,53	0
253	74	7412	Konawe Kepulauan	5,88	17,01	5,71	0
254	76	7603	Mamasa	21,86	13,38	4,92	0
255	11	1173	Kota Langsa	18,65	10,44	4,83	0
256	73	7308	Maros	34,62	9,74	4,07	0
257	18	1813	Pesisir Barat	22,24	14,29	4,94	0
258	33	3375	Kota Pekalongan	22,16	7,17	4,24	0
259	11	1113	Gayo Lues	18,42	19,32	5,25	0
260	12	1219	Batu Bara	49,78	11,88	3,77	0
261	33	3315	Grobogan	172,26	12,46	2,06	0
262	35	3508	Lumajang	102,60	9,83	2,44	0
263	34	3471	Kota Yogyakarta	31,62	7,27	3,67	0
264	31	3174	Kota Jakarta Barat	110,90	4,25	1,29	0
265	33	3316	Blora	103,73	11,96	2,63	0
266	33	3319	Kudus	64,24	7,31	2,59	0
267	61	6110	Melawi	25,34	12,04	4,36	0
268	71	7109	Minahasa Tenggara	13,73	12,30	4,83	0
269	11	1174	Kota Lhokseumawe	22,69	10,80	4,33	0
270	73	7316	Enrekang	25,25	12,17	4,33	0
271	33	3374	Kota Semarang	79,58	4,34	1,62	0
272	16	1611	Empat Lawang	31,89	12,63	4,13	0
273	16	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	39,50	10,85	3,72	0
274	81	8109	Buru Selatan	10,07	15,75	5,04	0
275	33	3311	Sukoharjo	68,89	7,68	2,52	0
276	74	7415	Buton Selatan	11,50	14,11	4,91	0
277	72	7207	Buol	22,93	13,93	4,46	0
278	74	7401	Buton	13,68	13,21	4,73	0
279	14	1405	Siak	25,38	5,09	3,24	0
280	12	1277	Kota Padangsidimpuan	16,56	7,40	4,13	0
281	14	1404	Pelalawan	45,88	9,16	3,23	0
282	16	1607	Banyu Asin	96,27	11,17	2,49	0

283	14	1409	Rokan Hilir	48,85	6,72	2,70	0
284	62	6202	Kotawaringin Timur	26,64	5,62	3,25	0
285	21	2172	Kota Tanjung Pinang	19,98	9,37	4,06	0
286	33	3376	Kota Tegal	19,55	7,80	3,88	0
287	82	8206	Halmahera Timur	14,97	15,45	4,56	0
288	21	2171	Kota Batam	67,06	4,75	1,80	0
289	52	5205	Dompu	30,97	12,16	3,82	0
290	14	1403	Indragiri Hilir	44,29	5,93	2,58	0
291	35	3520	Magetan	65,09	10,35	2,79	0
292	61	6103	Landak	42,36	11,12	3,38	0
293	12	1278	Kota Gunungsitoli	23,54	16,41	4,23	0
294	12	1211	Karo	36,57	8,70	3,22	0
295	94	9401	Merauke	22,89	10,03	3,83	0
296	11	1175	Kota Subulussalam	14,46	17,60	4,47	0
297	73	7315	Pinrang	33,56	8,86	3,26	0
298	12	1212	Deli Serdang	86,26	3,88	1,25	0
299	72	7202	Banggai	28,16	7,39	3,24	0
300	51	5171	Kota Denpasar	20,48	2,14	2,14	0
301	74	7414	Buton Tengah	14,40	15,32	4,27	0
302	12	1221	Padang Lawas	23,87	8,37	3,49	0
303	64	6471	Kota Balikpapan	17,02	2,57	2,57	0
304	64	6472	Kota Samarinda	41,92	4,76	2,22	0
305	11	1114	Aceh Tamiang	38,93	13,08	3,42	0
306	12	1201	Nias	23,12	16,60	4,00	0
307	32	3202	Sukabumi	175,10	7,09	1,12	0
308	73	7371	Kota Makassar	69,98	4,54	1,57	0
309	73	7305	Takalar	25,38	8,44	3,27	0
310	63	6303	Banjar	15,12	2,55	2,55	0
311	71	7110	Bolaang Mongondow Selatan	8,53	12,77	4,14	0
312	32	3272	Kota Sukabumi	25,42	7,70	3,14	0
313	71	7103	Kepulauan Sangihe	14,64	11,14	3,83	0
314	17	1702	Rejang Lebong	41,47	15,85	3,33	0
315	12	1274	Kota Tebing Tinggi	16,32	9,85	3,66	0
316	12	1210	Dairi	22,93	8,04	3,22	0
317	12	1272	Kota Tanjung Balai	23,54	13,33	3,59	0
318	12	1202	Mandailing Natal	41,31	9,18	2,76	0
319	61	6112	Kubu Raya	25,90	4,42	2,47	0
320	14	1406	Kampar	65,30	7,38	2,00	0
321	12	1217	Samosir	15,80	12,48	3,68	0
322	32	3207	Ciamis	91,39	7,62	1,65	0
323	18	1810	Pringsewu	40,12	9,97	2,75	0
324	65	6502	Bulungan	13,08	9,06	3,52	0
325	72	7211	Banggai Laut	11,09	14,60	3,81	0
326	53	5309	Flores Timur	27,89	10,84	3,09	0
327	13	1307	Agam	33,31	6,75	2,50	0
328	32	3206	Tasikmalaya	181,52	10,34	1,25	0
329	33	3312	Wonogiri	104,37	10,86	1,81	0
330	18	1802	Tanggamus	70,37	11,68	2,28	0

331	17	1707	Lebong	13,97	11,85	3,52	0
332	18	1808	Tulangbawang	42,43	9,33	2,54	0
333	74	7406	Bombana	18,84	10,01	3,22	0
334	12	1215	Humbang Hasundutan	17,92	9,36	3,20	0
335	11	1101	Simeulue	17,34	18,49	3,56	0
336	16	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	24,17	12,62	3,20	0
337	35	3574	Kota Probolinggo	17,72	7,43	3,04	0
338	31	3171	Kota Jakarta Selatan	78,09	3,43	1,00	0
339	15	1506	Tanjung Jabung Timur	24,23	10,95	3,06	0
340	71	7106	Minahasa Utara	14,33	7,00	3,09	0
341	15	1503	Sarolangun	25,79	8,42	2,79	0
342	11	1172	Kota Sabang	5,27	14,94	3,73	0
343	73	7313	Wajo	27,69	6,95	2,54	0
344	73	7307	Sinjai	22,06	9,00	2,92	0
345	51	5103	Badung	13,75	2,02	2,02	0
346	65	6501	Malinau	6,16	6,63	3,37	0
347	71	7104	Kepulauan Talaud	8,84	9,49	3,36	0
348	61	6102	Bengkayang	17,11	6,62	2,82	0
349	12	1218	Serdang Bedagai	49,18	7,97	2,08	0
350	17	1706	Mukomuko	23,10	11,72	2,97	0
351	33	3371	Kota Magelang	9,27	7,58	3,22	0
352	64	6401	Paser	26,77	9,23	2,70	0
353	61	6105	Sanggau	21,16	4,46	2,30	0
354	63	6310	Tanah Bumbu	16,83	4,60	2,52	0
355	12	1207	Labuhan Batu	42,17	8,44	2,25	0
356	35	3573	Kota Malang	38,77	4,44	1,72	0
357	13	1303	Solok	29,28	7,81	2,47	0
358	73	7325	Luwu Timur	20,82	6,85	2,58	0
359	64	6403	Kutai Kartanegara	58,42	7,31	1,76	0
360	17	1709	Bengkulu Tengah	10,79	9,30	3,10	0
361	64	6402	Kutai Barat	13,78	9,29	2,98	0
362	73	7372	Kota Parepare	7,96	5,44	2,96	0
363	15	1501	Kerinci	17,48	7,30	2,69	0
364	32	3277	Kota Cimahi	31,64	5,11	1,94	0
365	19	1903	Bangka Barat	5,83	2,70	2,70	0
366	76	7604	Mamuju	20,65	6,92	2,49	0
367	14	1408	Bengkalis	36,96	6,40	1,97	0
368	71	7105	Minahasa Selatan	19,38	9,14	2,70	0
369	72	7271	Kota Palu	26,89	6,80	2,25	0
370	12	1216	Pakpak Bharat	4,59	9,28	3,16	0
371	64	6411	Mahakam Hulu	3,26	11,44	3,24	0
372	11	1171	Kota Banda Aceh	18,97	6,90	2,47	0
373	61	6107	Sintang	39,19	9,27	2,17	0
374	15	1509	Bungo	22,07	5,80	2,25	0
375	16	1672	Kota Prabumulih	21,83	11,59	2,69	0
376	18	1872	Kota Metro	14,31	8,47	2,71	0
377	16	1609	Ogan Komering Ulu Timur	71,10	10,43	1,74	0
378	12	1273	Kota Pematang Siantar	21,23	8,27	2,44	0

379	15	1504	Batang Hari	26,54	9,65	2,40	0
380	94	9419	Sarmi	5,70	13,87	3,06	0
381	73	7314	Sidenreng Rappang	15,36	5,05	2,30	0
382	31	3173	Kota Jakarta Pusat	41,92	4,51	1,45	0
383	18	1812	Tulang Bawang Barat	20,29	7,39	2,36	0
384	71	7172	Kota Bitung	14,18	6,41	2,49	0
385	71	7102	Minahasa	24,95	7,30	2,20	0
386	82	8202	Halmahera Tengah	7,70	13,56	2,88	0
387	73	7303	Bantaeng	16,84	8,95	2,44	0
388	13	1372	Kota Solok	1,99	2,77	2,77	0
389	61	6111	Kayong Utara	10,90	9,56	2,62	0
390	36	3601	Pandeglang	120,44	9,92	1,16	0
391	71	7111	Bolaang Mongondow Timur	4,30	5,88	2,72	0
392	12	1206	Toba Samosir	16,05	8,71	2,40	0
393	61	6101	Sambas	41,41	7,70	1,73	0
394	31	3172	Kota Jakarta Timur	122,73	4,16	0,61	0
395	62	6204	Barito Selatan	6,12	4,45	2,48	0
396	12	1222	Labuhan Batu Selatan	28,63	8,34	2,00	0
397	12	1203	Tapanuli Selatan	23,96	8,47	2,12	0
398	21	2105	Kepulauan Anambas	2,80	6,56	2,72	0
399	62	6203	Kapuas	18,17	5,04	1,96	0
400	21	2102	Bintan	10,21	6,36	2,37	0
401	73	7310	Barru	14,44	8,26	2,31	0
402	33	3301	Cilacap	198,60	11,46	0,87	0
403	61	6171	Kota Pontianak	30,70	4,70	1,53	0
404	71	7101	Bolaang Mongondow	18,07	7,27	2,12	0
405	63	6304	Barito Kuala	14,25	4,51	1,98	0
406	76	7606	Mamuju Tengah	9,25	6,79	2,37	0
407	35	3504	Tulungagung	76,40	7,33	1,18	0
408	71	7173	Kota Tomohon	6,06	5,60	2,43	0
409	14	1402	Indragiri Hulu	26,66	5,96	1,75	0
410	13	1304	Sijunjung	16,28	6,78	2,10	0
411	74	7472	Kota Baubau	12,53	7,15	2,22	0
412	19	1904	Bangka Tengah	9,64	4,85	2,13	0
413	64	6409	Penajam Paser Utara	11,93	7,36	2,20	0
414	74	7471	Kota Kendari	17,46	4,34	1,74	0
415	35	3571	Kota Kediri	22,19	7,69	1,93	0
416	62	6213	Murung Raya	7,18	5,85	2,27	0
417	65	6571	Kota Tarakan	17,33	6,24	1,93	0
418	12	1220	Padang Lawas Utara	26,79	9,70	1,93	0
419	13	1308	Lima Puluh Kota	26,43	6,86	1,72	0
420	13	1311	Dharmasraya	15,70	6,23	1,94	0
421	35	3579	Kota Batu	8,12	3,89	1,99	0
422	71	7174	Kota Kotamobagu	7,06	5,42	2,14	0
423	63	6308	Hulu Sungai Utara	14,72	6,14	1,90	0
424	36	3673	Kota Serang	42,24	6,06	1,28	0
425	73	7312	Soppeng	17,23	7,59	1,86	0
426	33	3306	Purworejo	84,79	11,78	1,24	0

427	65	6504	Nunukan	13,76	6,36	1,86	0
428	73	7373	Kota Palopo	14,71	7,85	1,92	0
429	82	8207	Pulau Morotai	4,43	6,46	2,19	0
430	63	6301	Tanah Laut	14,79	4,26	1,63	0
431	51	5102	Tabanan	19,11	4,27	1,49	0
432	12	1271	Kota Sibolga	10,49	11,95	2,11	0
433	35	3575	Kota Pasuruan	13,40	6,66	1,86	0
434	13	1373	Kota Sawah Lunto	1,36	2,16	2,16	0
435	62	6211	Gunung Mas	5,78	4,75	2,02	0
436	82	8208	Pulau Taliabu	3,89	7,30	2,18	0
437	15	1502	Merangin	33,92	8,63	1,54	0
438	15	1572	Kota Sungai Penuh	2,78	3,03	2,07	0
439	51	5104	Gianyar	21,01	4,08	1,38	0
440	73	7302	Bulukumba	30,00	7,10	1,48	0
441	13	1310	Solok Selatan	12,39	7,15	1,86	0
442	18	1811	Mesuji	14,72	7,33	1,76	0
443	35	3572	Kota Blitar	11,10	7,78	1,86	0
444	12	1205	Tapanuli Utara	28,41	9,37	1,57	0
445	15	1508	Tebo	22,47	6,26	1,46	0
446	62	6271	Kota Palangka Raya	10,23	3,44	1,54	0
447	13	1302	Pesisir Selatan	35,46	7,61	1,32	0
448	13	1371	Kota Padang	42,17	4,40	0,93	0
449	62	6208	Seruyan	14,53	6,85	1,64	0
450	19	1902	Belitung	12,07	6,27	1,67	0
451	71	7107	Bolaang Mongondow Utara	6,82	8,41	1,88	0
452	63	6302	Kota Baru	14,60	4,22	1,43	0
453	63	6311	Balangan	7,06	5,32	1,73	0
454	35	3576	Kota Mojokerto	8,09	6,24	1,72	0
455	71	7108	Siau Tagulandang Biaro	5,95	8,94	1,84	0
456	16	1673	Kota Pagar Alam	12,71	9,07	1,66	0
457	62	6210	Pulang Pisau	5,21	4,09	1,65	0
458	64	6405	Berau	12,30	5,19	1,46	0
459	82	8203	Kepulauan Sula	8,81	8,35	1,66	0
460	19	1905	Bangka Selatan	7,49	3,52	1,46	0
461	51	5105	Klungkung	8,76	4,87	1,51	0
462	63	6372	Kota Banjar Baru	10,75	4,01	1,36	0
463	12	1276	Kota Binjai	15,91	5,71	1,34	0
464	82	8204	Halmahera Selatan	12,41	5,21	1,40	0
465	13	1376	Kota Payakumbuh	7,74	5,65	1,55	0
466	13	1309	Pasaman	20,29	7,16	1,33	0
467	32	3279	Kota Banjar	11,16	6,09	1,44	0
468	19	1971	Kota Pangkal Pinang	9,40	4,36	1,39	0
469	63	6306	Hulu Sungai Selatan	12,39	5,17	1,35	0
470	63	6309	Tabalong	14,70	5,72	1,26	0
471	33	3373	Kota Salatiga	9,69	4,94	1,27	0
472	82	8201	Halmahera Barat	10,56	8,82	1,35	0
473	35	3577	Kota Madiun	8,83	4,98	1,25	0
474	62	6205	Barito Utara	6,78	5,17	1,29	0

475	63	6371	Kota Banjarmasin	31,31	4,39	0,78	0
476	19	1906	Belitung Timur	8,56	6,52	1,26	0
477	64	6474	Kota Bontang	7,91	4,38	1,19	0
478	61	6109	Sekadau	11,92	5,87	1,16	0
479	33	3320	Jepara	91,14	7,17	0,54	0
480	13	1306	Padang Pariaman	28,98	6,95	0,91	0
481	52	5272	Kota Bima	14,66	8,35	1,12	0
482	13	1312	Pasaman Barat	31,64	7,04	0,86	0
483	75	7571	Kota Gorontalo	12,46	5,59	1,04	0
484	82	8271	Kota Ternate	8,18	3,46	1,03	0
485	82	8205	Halmahera Utara	8,75	4,45	1,05	0
486	63	6305	Tapin	5,90	3,06	1,03	0
487	13	1375	Kota Bukittinggi	6,01	4,54	1,07	0
488	61	6172	Kota Singkawang	10,23	4,53	0,94	0
489	13	1305	Tanah Datar	15,34	4,40	0,81	0
490	19	1901	Bangka	15,41	4,51	0,77	0
491	21	2101	Karimun	15,99	6,83	0,82	0
492	82	8272	Kota Tidore Kepulauan	6,66	6,52	0,95	0
493	62	6201	Kotawaringin Barat	11,46	3,59	0,74	0
494	62	6207	Lamandau	2,61	3,09	0,93	0
495	51	5107	Karang Asem	24,69	5,91	0,65	0
496	15	1505	Muaro Jambi	17,30	3,83	0,63	0
497	51	5108	Buleleng	35,25	5,32	0,52	0
498	63	6307	Hulu Sungai Tengah	15,47	5,64	0,71	0
499	13	1374	Kota Padang Panjang	2,84	5,24	0,88	0
500	61	6104	Pontianak	13,18	4,95	0,70	0
501	33	3323	Temanggung	77,33	9,96	0,46	0
502	62	6209	Katingan	8,23	4,79	0,70	0
503	81	8171	Kota Ambon	22,15	4,51	0,52	0
504	13	1377	Kota Pariaman	3,66	4,10	0,77	0
505	36	3672	Kota Cilegon	16,31	3,69	0,50	0
506	65	6503	Tana Tidung	1,46	4,81	0,67	0
507	36	3604	Serang	74,80	4,94	0,22	0
508	51	5101	Jembrana	12,60	4,51	0,47	0
509	62	6212	Barito Timur	7,88	6,09	0,54	0
510	62	6206	Sukamara	2,13	3,23	0,42	0
511	51	5106	Bangli	9,56	4,19	0,33	0
512	21	2103	Natuna	3,47	4,43	0,35	0
513	76	7605	Mamuju Utara	7,95	4,48	0,28	0
514	14	1473	Kota Dumai	9,88	3,16	0,24	0

Ringkasan Kebijakan **Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024** ini ditulis oleh Ardi Adji, Priadi Asmanto, Dhani Nugroho, Alie Sadikin, Nur Budi Handayani.

Publikasi ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program MAHKOTA. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Australia. Pembaca dipersilakan untuk menyalin, menyebarluaskan, dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan nonkomersial.

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Grand Kebon Sirih Lt.5
Jl.Kebon Sirih Raya No.35
Jakarta Pusat, 10110
T. 021 - 3912812

www.tnp2k.go.id